

Strategi Diplomasi Budaya Indonesia melalui MACFest 2023 sebagai Upaya Menangkal Internasionalisasi Isu Papua di Vanuatu

Avenia Meriska^{1*}, Indra Wisnu Wibisono², Roberto Octavianus Cornelis Seba³

^{1*,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana

Corresponding Author's e-mail : aveniabaunik11@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4 Juni 2026

Page: 2718 - 2734

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2831>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.2831>

Article History:

Received: 15-06-2026

Revised: 27-08-2026

Accepted: 27-08-2026

Abstract : *This study aims to analyze Indonesia's cultural diplomacy strategy through the Melanesian Arts and Culture Festival (MACFest) 2023 in Vanuatu as an effort to counter the internationalization of the Papua issue in the Pacific region. The internationalization of the Papua issue has become a diplomatic challenge for Indonesia as it continues to receive attention and support from several Pacific countries, particularly Vanuatu, in various international forums. To address this challenge, Indonesia employs cultural diplomacy as a soft power instrument to build a positive image, strengthen relations with Melanesian countries, and promote an alternative narrative regarding Papua. This research uses a descriptive qualitative approach with a literature study method, drawing data from books, academic journals, government documents, official reports, and publications related to MACFest 2023. The analysis is based on the concepts of cultural diplomacy, nation branding, and Joseph S. Nye's soft power theory. The findings indicate that Indonesia's participation in MACFest 2023 served as a strategic platform to showcase its Melanesian identity through cultural performances, exhibitions, and people-to-people interactions. This strategy contributed to fostering a positive perception of Indonesia, strengthening relations with Pacific countries, and supporting efforts to mitigate the internationalization of the Papua issue through a persuasive and non-coercive approach.*

Keywords : *Cultural Diplomacy, Soft Power, MACFest 2023, Papua, Vanuatu, Nation Branding.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi diplomasi budaya Indonesia melalui Melanesian Arts and Culture Festival (MACFest) 2023 di Vanuatu sebagai upaya menangkal internasionalisasi isu Papua di kawasan Pasifik. Internasionalisasi isu Papua menjadi tantangan diplomatik bagi Indonesia karena terus memperoleh perhatian dan dukungan dari beberapa negara Pasifik, khususnya Vanuatu, dalam berbagai forum internasional. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia memanfaatkan diplomasi budaya sebagai instrumen soft power guna membangun citra positif, memperkuat hubungan dengan negara-negara Melanesia, dan menyampaikan narasi alternatif mengenai Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, laporan resmi, dan publikasi terkait MACFest 2023. Analisis penelitian menggunakan konsep diplomasi budaya, nation branding, dan teori soft power Joseph S. Nye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi Indonesia dalam MACFest 2023 menjadi sarana strategis untuk menampilkan identitas Melanesia Indonesia melalui pertunjukan seni, pameran budaya, dan interaksi antarmasyarakat. Strategi tersebut berkontribusi dalam membangun persepsi positif terhadap Indonesia, memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik, serta mendukung upaya meredam internasionalisasi isu Papua melalui pendekatan yang persuasif dan non-koersif.

Kata Kunci : Diplomasi Budaya, Soft Power, MACFest 2023, Papua, Vanuatu, Nation Branding.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika hubungan internasional modern, kekuatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer dan ekonomi yang bersifat koersif (*hard power*), melainkan juga oleh kemampuan untuk memengaruhi, menarik simpati, dan membentuk persepsi positif melalui daya tarik budaya, nilai, serta kebijakan yang kredibel. Kemampuan ini disebut oleh Joseph S. Nye Jr. sebagai *soft power*, yaitu kekuatan untuk “mendapatkan hasil yang diinginkan bukan melalui paksaan atau imbalan, melainkan melalui daya tarik” (Nye, 2004). Dalam kerangka ini, diplomasi budaya menempati posisi strategis sebagai salah satu pilar utama *soft power*, karena berfungsi membangun citra positif (*nation branding*), memperkuat hubungan antarbangsa (*people-to-people contact*), serta menginternalisasi nilai dan identitas nasional ke dalam ruang publik internasional. Melalui diplomasi budaya, negara dapat memproyeksikan kekuatan simbolik yang lembut namun efektif untuk membentuk opini, menumbuhkan rasa kedekatan, dan menciptakan legitimasi moral di mata masyarakat global, oleh karena itu, diplomasi budaya bukan hanya sekadar sarana pertukaran seni dan tradisi, tetapi juga instrumen politik luar negeri yang berfungsi strategis dalam memperluas pengaruh nasional di era globalisasi yang kompetitif. Indonesia memiliki modal kebudayaan yang luar biasa besar dalam mendukung praktik diplomasi budaya sebagai instrumen *Soft power*, keanekaragaman etnis, bahasa, dan kepercayaan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang multikultural di dunia jadi Terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara (BPS, 2021).

Keberagaman ini bukan hanya warisan historis, tetapi juga merupakan *cultural capital* yang dapat dimobilisasi untuk memperkuat citra Indonesia sebagai bangsa yang plural, toleran, dan harmonis. Dalam konteks diplomasi budaya, pluralitas tersebut berfungsi sebagai simbol integrasi sosial yang memperlihatkan kemampuan Indonesia menjaga persatuan di tengah perbedaan. Potensi ini memiliki nilai strategis dalam hubungan internasional karena menampilkan Indonesia sebagai model keberagaman yang damai dan inklusif, sesuai dengan prinsip “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang diakui dunia internasional sebagai manifestasi nilai demokrasi dan harmoni sosial. Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki orientasi kebijakan luar negeri yang tidak terikat pada blok kekuasaan tertentu, namun tetap aktif berperan dalam upaya menjaga perdamaian, keadilan, dan kerja sama internasional. Prinsip bebas aktif tersebut menuntun Indonesia untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tanggung jawab global, termasuk melalui pendekatan non-konfrontatif seperti diplomasi budaya. Dalam konteks ini, diplomasi budaya berfungsi sebagai instrumen implementatif politik luar negeri yang menekankan pendekatan dialogis, persuasif, dan kooperatif (Wardhani, 2023). Pada dekade terakhir, Indonesia memperluas orientasi kebijakan luar negerinya ke kawasan Pasifik melalui strategi *Pacific Elevation*, yaitu inisiatif diplomatik yang berfokus pada peningkatan keterlibatan dengan negara-negara Melanesia melalui kerja sama pembangunan, kebudayaan, dan kemanusiaan (KEMENLU, 2019). Strategi ini menunjukkan upaya Indonesia dalam membangun konektivitas sosial-kultural dengan negara-negara Pasifik Selatan serta memperkuat legitimasi politiknya di kawasan yang memiliki kedekatan etnis dan historis dengan sebagian wilayah timur Indonesia.

Pelaksanaan diplomasi budaya Indonesia di kawasan Pasifik didukung oleh sejumlah kebijakan dan regulasi pemerintah yang memberikan kerangka hukum dan kelembagaan. Di tingkat nasional, Kementerian Luar Negeri melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Diplomasi Publik menetapkan diplomasi budaya sebagai salah satu bentuk diplomasi publik yang berperan dalam membangun citra positif Indonesia di

dunia internasional. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga memiliki mandat melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Diplomasi Kebudayaan Indonesia, yang menegaskan pentingnya pelestarian, promosi, dan pertukaran budaya sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri.

Secara regional, diplomasi budaya Indonesia di Pasifik memperoleh landasan kelembagaan melalui keanggotaan Indonesia sebagai *associaste member* dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG) sebuah organisasi sub-regional yang beranggotakan negara-negara Melanesia seperti Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Keanggotaan ini disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Keanggotaan Indonesia pada MSG. Status tersebut memungkinkan Indonesia berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kebudayaan, yang menjadi platform penting untuk memperkuat diplomasi budaya dan mengartikulasikan identitas Indonesia sebagai bagian dari komunitas Melanesia. Dengan dukungan regulasi tersebut, diplomasi budaya Indonesia di Pasifik tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki dasar hukum dan arah kebijakan yang jelas dalam konteks pelaksanaan politik luar negeri.

hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik tidak terlepas dari tantangan besar berupa datangnya internasionalisasi isu Papua. Isu Papua merupakan salah satu tantangan paling kompleks dalam diplomasi luar negeri Indonesia. Sejak penyerahan wilayah Papua Barat dari Belanda kepada Indonesia melalui New York Agreement tahun 1962 dan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, muncul perbedaan persepsi terkait legitimasi hasil integrasi tersebut (Elmslie & Webb Gannon, 2013). Kelompok separatis yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kemudian United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) berupaya menginternasionalisasi isu Papua melalui jaringan aktivis dan dukungan dari beberapa negara Pasifik, terutama Vanuatu.

Vanuatu, salah satu negara kecil di kawasan Oseania yang paling konsisten mendukung kemerdekaan Papua melalui forum internasional seperti PBB, dan *Melanesian Spearhead Group* (MSG), guna mendesak intervensi internasional terhadap situasi keamanan di Papua. Upaya ini secara sistematis bertujuan untuk menciptakan opini publik global bahwa wilayah Papua masih merupakan subjek dekolonisasi yang belum tuntas di kawasan Pasifik Akibatnya, isu Papua tidak lagi bersifat domestik, melainkan menjadi isu regional yang memerlukan respons diplomasi yang lebih kreatif dan persuasif, salah satunya melalui pendekatan diplomasi budaya. Salah satu bentuk konkret strategi dalam meredam internasionalisasi tersebut yaitu diplomasi budaya Indonesia di kawasan Pasifik oleh *Melanesian Arts and Cultural Festival* (MACFest). Festival ini pertama kali digagas oleh negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) pada pertengahan 1990-an, dengan tujuan memperkuat solidaritas budaya dan identitas Melanesia melalui kegiatan seni, musik, tari, dan pameran kebudayaan. Sejak penyelenggaraan pertamanya pada tahun 1998 di Kepulauan Solomon, MACFest sudah menjadi ajang rutin beberapa tahun sekali yang menampilkan kekayaan budaya negara-negara pasifik, di tahun 2015 Indonesia sempat menjadi *associaste member* dari Melanesian Spearhead Group (MSG) dan telah berpartisipasi hingga pada tahun 2018, Indonesia secara konsisten terus berusaha menunjukkan identitas Melanesianya melalui festival tersebut, dan cukup terbilang berhasil membawakan hubungan baik dengan negara-negara pasifik (Fahmi, 2023).

Seiring masih beredarnya Isu Papua di kawasan pasifik, masih menjadi tantangan bagi Indonesia. MACFest akan terus berjalan, tepat pada tahun 2023 MACFest edisi 7th Melanesian Arts and Culture Festival yang diadakan di Port Vila, telah kembali diselenggarakan pada 25- 30 Juli di Port Vila, Vanuatu. dikarenakan Indonesia saat itu masih berstatus sebagai *associaste member*

MSG, Undangan kepada Indonesia berpartisipasi lagi dalam festival disampaikan secara khusus oleh Direktur Jenderal *Melanesian Spearhead Group* (MSG) saat bertemu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Desember lalu (KEMENLU RI, 2023). undangan yang sama oleh Wakil Perdana Menteri Vanuatu, Jotham Napat kepada Menlu Retno saat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada Juni lalu. Indonesia telah mengirimkan beberapa delegasi seni dari Papua dan Nusa Tenggara Timur yang menampilkan sejumlah lagu tradisional, serta tarian asal Papua guna mempromosikan keanekaragaman budaya dari provinsi bercorak Melanesia Indonesia, Serangkaian pertunjukan yang akan dilakukan oleh para seniman ini membawa misi kebudayaan, persahabatan dan isu lingkungan (Bataona, 2023). Partisipasi Indonesia dalam ajang *Melanesian Arts and Culture Festival* (MACFest) diharapkan menjadi sarana untuk menyampaikan pesan tentang semangat kebersamaan serta memperkuat komitmen kerja sama antara masyarakat Melanesia di Indonesia dengan komunitas di negara-negara Pasifik, khususnya di kawasan Melanesia. Kehadiran ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk terus mempererat hubungan dengan negara-negara Pasifik melalui implementasi visi *Pacific Elevation* (Herindrasti, 2025).

Penampilan ini juga tidak hanya menonjolkan kekayaan budaya Indonesia, tetapi juga menegaskan kedekatan etno-kultural antara masyarakat Melanesia di Indonesia dan di Pasifik (Pugu, 2024). Partisipasi oleh Indonesia juga membuka ruang dialog kultural dengan masyarakat Vanuatu, memperlihatkan bahwa Papua merupakan bagian dari keluarga besar Melanesia yang berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain pertunjukan seni, paviliun Indonesia di MACFest menampilkan narasi visual mengenai pembangunan berkelanjutan di Papua, yang menjadi bentuk komunikasi publik untuk menepis tuduhan pelanggaran HAM dan menunjukkan kemajuan sosial ekonomi di wilayah tersebut.

Hubungan antara MACFest dan isu Papua bersifat kontekstual, bukan kausal. Festival ini berdiri atas dasar budaya, tetapi dimanfaatkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai saluran diplomasi lunak di tengah tensi politik regional. Diplomasi budaya Indonesia melalui partisipasi aktif di MACFest 2023, telah menampilkan wajah multikulturalnya, memperkuat keterikatan etno-historis dengan komunitas Melanesia, dan membangun persepsi positif di tingkat masyarakat Pasifik. Meski efeknya masih bersifat simbolik, strategi diplomasi budaya ini terbukti mampu menciptakan ruang dialog dan memperhalus hubungan dengan negara-negara yang selama ini kritis terhadap isu Papua. diplomasi budaya Indonesia melalui MACFest 2023 tidak sekadar kegiatan kebudayaan, melainkan strategi *soft power* yang terencana untuk menangkai internasionalisasi isu Papua, memperkuat solidaritas regional, serta menjaga citra dan kedaulatan nasional di tengah dinamika geopolitik kawasan Pasifik.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana strategi diplomasi budaya Indonesia dirancang dan diimplementasikan melalui partisipasi dalam MACFest 2023. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai bagaimana diplomasi budaya sebagai alat *soft power* dalam membentuk persepsi positif terhadap Indonesia di kawasan Pasifik serta merespons tekanan diplomatik akibat internasionalisasi isu Papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis strategi diplomasi budaya Indonesia melalui *Melanesian Arts and Culture Festival* (MACFest) 2023 dalam menangkai internasionalisasi isu Papua. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, publikasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, laporan MSG, serta sumber-sumber relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*)

dengan menggunakan konsep diplomasi budaya, teori soft power Joseph S. Nye (2004), dan *nation branding* sebagai kerangka analisis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Internasionalisasi isu Papua merupakan proses ketika persoalan Papua tidak lagi dipandang sebagai masalah domestik Indonesia, tetapi berkembang menjadi isu yang mendapat perhatian masyarakat internasional. Akar permasalahan ini berawal dari integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Perjanjian New York tahun 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. Pemerintah Indonesia menganggap proses tersebut sah berdasarkan hukum internasional dan pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, sebagian kelompok pro-kemerdekaan Papua menilai pelaksanaan PEPERA tidak sepenuhnya demokratis sehingga memunculkan berbagai tuntutan pemisahan diri dari Indonesia (Kusnianti, 2020).

Perkembangan isu Papua kemudian tidak hanya berkaitan dengan tuntutan kemerdekaan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Ketimpangan pembangunan, isu hak asasi manusia (HAM), pengelolaan sumber daya alam, serta identitas budaya Melanesia yang dimiliki masyarakat Papua menjadi faktor yang sering digunakan dalam narasi kelompok pro-kemerdekaan. Berbagai isu tersebut kemudian disebarluaskan melalui organisasi HAM internasional, media global, dan kampanye politik yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua untuk memperoleh dukungan dari masyarakat internasional (Yesica, 2022).

Salah satu aktor yang berperan penting dalam internasionalisasi isu Papua adalah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang didirikan pada tahun 2014 sebagai organisasi payung kelompok pro-kemerdekaan Papua. ULMWP aktif melakukan diplomasi internasional dengan memanfaatkan identitas Melanesia dan isu HAM untuk memperoleh dukungan dari negara-negara di kawasan Pasifik, khususnya melalui forum *Melanesian Spearhead Group* (MSG). Melalui pendekatan tersebut, isu Papua semakin sering dibahas dalam berbagai forum regional maupun internasional. Di kawasan Pasifik, beberapa negara menunjukkan dukungan terhadap isu Papua. Kepulauan Solomon pernah mengusulkan dialog antara Pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta menyatakan kesediaannya untuk menjadi mediator. Palau juga termasuk negara yang mendorong perhatian internasional terhadap isu Papua, sementara Tuvalu secara terbuka menyampaikan dukungan terhadap kampanye Papua Barat dalam Sidang Majelis Umum PBB. Dukungan tersebut umumnya didasarkan pada pertimbangan isu HAM dan solidaritas sesama masyarakat Melanesia.

Meskipun demikian, tidak semua negara Pasifik mendukung internasionalisasi isu Papua. Fiji dan Papua Nugini cenderung mengambil posisi yang lebih moderat dengan menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Sikap tersebut didasarkan pada kepentingan menjaga stabilitas kawasan, hubungan ekonomi, serta kerja sama bilateral dengan Indonesia. Perbedaan sikap antarnegara Pasifik menunjukkan bahwa isu Papua menjadi salah satu dinamika politik yang memengaruhi hubungan regional di kawasan tersebut.

Di antara negara-negara Pasifik, Vanuatu merupakan negara yang paling konsisten mendukung isu Papua di forum internasional. Dukungan tersebut berakar pada solidaritas Melanesia, sejarah perjuangan anti-kolonialisme, serta pandangan politik yang menganggap perjuangan Papua sebagai bagian dari pembebasan bangsa-bangsa Melanesia. Sejak tahun 2016, Vanuatu secara aktif mengangkat isu Papua dalam Sidang Umum PBB dan forum internasional lainnya. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan Vanuatu sebagai aktor utama dalam

internasionalisasi isu Papua sekaligus mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi diplomasi politik, pembangunan, dan budaya guna mempertahankan kepentingan nasional serta membangun citra positif di kawasan Pasifik Selatan (Pugu, 2024).

Hubungan Diplomatik Indonesia dan Vanuatu

Hubungan diplomatik Indonesia dan Vanuatu resmi terjalin pada tahun 1995 melalui penandatanganan Komunike Bersama saat kunjungan Perdana Menteri Vanuatu, Maxim Carlot Korman, ke Indonesia. Pada awal hubungan bilateral, kedua negara berupaya membangun kerja sama di bidang politik, pembangunan, dan hubungan kawasan Pasifik. Namun, hubungan tersebut kemudian mengalami dinamika akibat perbedaan pandangan mengenai isu Papua yang menjadi salah satu isu utama dalam hubungan kedua negara.

Vanuatu merupakan negara yang paling aktif mendukung internasionalisasi isu Papua di berbagai forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *Melanesian Spearhead Group* (MSG). Dukungan tersebut didasarkan pada solidaritas Melanesia, sejarah perjuangan anti-kolonialisme, serta pandangan politik yang menganggap Papua sebagai bagian dari komunitas Melanesia. Kondisi ini menyebabkan hubungan Indonesia dan Vanuatu sering diwarnai perbedaan pandangan terkait isu Papua. Sebagai respons terhadap tekanan diplomatik tersebut, Indonesia mengembangkan strategi yang lebih aktif di kawasan Pasifik melalui kebijakan *Pacific Elevation*. Kebijakan ini menempatkan kawasan Pasifik sebagai salah satu prioritas diplomasi luar negeri Indonesia dengan memperkuat kerja sama pembangunan, bantuan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta hubungan ekonomi dengan negara-negara Pasifik, termasuk Vanuatu.

Selain diplomasi politik dan pembangunan, Indonesia juga memanfaatkan diplomasi kemanusiaan sebagai instrumen untuk membangun citra positif di kawasan Pasifik. Indonesia beberapa kali memberikan bantuan kepada Vanuatu saat terjadi bencana alam, seperti bantuan pasca Topan Pam tahun 2015 dan bantuan logistik serta medis ketika terjadi gempa bumi. Melalui bantuan tersebut, Indonesia berupaya menunjukkan komitmennya sebagai mitra regional yang peduli terhadap negara-negara Pasifik.

Di bidang budaya dan pendidikan, Indonesia aktif mempromosikan identitas Melanesia yang dimiliki wilayah Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur melalui berbagai kegiatan budaya dan partisipasi dalam forum MSG. Indonesia juga menawarkan program beasiswa dan kerja sama pendidikan bagi masyarakat Pasifik sebagai bagian dari strategi soft power. Melalui pendekatan politik, pembangunan, kemanusiaan, budaya, dan pendidikan tersebut, Indonesia berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik sekaligus menjaga kepentingan nasional dan meredam internasionalisasi isu Papua di kawasan Pasifik Selatan.

***Melanesian Spehear Group* (MSG) dan *Melanesian Arts Culture* (MACFest)**

Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan organisasi sub-regional di kawasan Pasifik Selatan yang dibentuk pada tahun 1986 oleh negara-negara rumpun Melanesia, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan *Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste* (FLNKS) dari Kaledonia Baru. Organisasi ini didirikan untuk memperkuat kerja sama politik, ekonomi, sosial, dan budaya antarnegara Melanesia serta menjadi wadah pembahasan berbagai isu strategis di kawasan Pasifik Selatan, termasuk isu Papua yang kerap menjadi perhatian beberapa negara anggotanya. Bagi Indonesia, MSG memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan dinamika internasionalisasi isu Papua di kawasan Pasifik. Indonesia mulai terlibat sebagai pengamat (observer) pada tahun 2011 dan kemudian memperoleh status associate member pada tahun 2015. Keanggotaan ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat

hubungan dengan negara-negara Melanesia sekaligus menegaskan bahwa masyarakat di Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari rumpun Melanesia yang berada dalam wilayah Indonesia. Melalui forum MSG, Indonesia aktif menjalankan diplomasi budaya, kerja sama pembangunan, bantuan kemanusiaan, serta program pendidikan untuk memperkuat citra positif dan pengaruhnya di kawasan Pasifik Selatan.

Salah satu program budaya terbesar yang lahir dari MSG adalah *Melanesian Arts and Culture Festival* (MACFest). Festival ini dicetuskan oleh para pemimpin MSG pada tahun 1995 dan pertama kali diselenggarakan pada tahun 1998 di Kepulauan Solomon. MACFest merupakan festival budaya dua tahunan yang bertujuan melestarikan, mempromosikan, dan memperkuat identitas budaya Melanesia melalui berbagai kegiatan seperti pertunjukan seni, tarian tradisional, musik, pameran kerajinan, kuliner, dan pertukaran budaya antar masyarakat Melanesia. Festival ini menjadi simbol persatuan dan solidaritas negara-negara Melanesia sekaligus ruang diplomasi budaya yang mempertemukan berbagai aktor budaya di kawasan Pasifik Selatan. Sejak menjadi anggota asosiasi MSG, Indonesia secara aktif memanfaatkan MACFest sebagai instrumen diplomasi budaya. Indonesia menampilkan beragam budaya Melanesia dari Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur untuk memperkenalkan keberagaman budaya nasional sekaligus menunjukkan kedekatan historis dan kultural dengan masyarakat Melanesia (Pugu, 2024). Melalui partisipasi tersebut, Indonesia berupaya membangun pemahaman bahwa identitas Melanesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia.

Peran MACFest semakin penting dalam konteks hubungan Indonesia dan negara-negara Pasifik ketika isu Papua semakin sering diinternasionalisasikan. Pada penyelenggaraan MACFest 2023 di Port Vila, Vanuatu, Indonesia kembali berpartisipasi dengan mengirim delegasi budaya yang menampilkan seni pertunjukan, musik tradisional, tarian, serta pameran budaya dari wilayah-wilayah beridentitas Melanesia di Indonesia. Kehadiran Indonesia dalam festival tersebut tidak hanya bertujuan mempererat hubungan budaya dengan negara-negara anggota MSG, tetapi juga menjadi sarana soft power untuk membangun citra positif Indonesia, memperkuat nation branding sebagai negara multikultural yang memiliki akar Melanesia, serta menyampaikan narasi alternatif mengenai Papua di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap isu tersebut. Dengan demikian, MACFest 2023 tidak hanya berfungsi sebagai festival budaya, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi budaya Indonesia dalam memperkuat hubungan regional dan mendukung kepentingan nasional di kawasan Pasifik Selatan.

Strategi Diplomasi Budaya Indonesia Melalui MACFest 2023

Representasi Budaya sebagai Alat Diplomasi (Tari, Musik, Simbol, Budaya Papua & NTT) Indonesia menggunakan pendekatan soft power dari 28 delegasi seniman daerah yang telah dikirimkan lalu merepresentasikan identitas Melanesia dalam bingkai NKRI. Para penampilan oleh Tim Papua dalam Cinta Terdiri dari penyanyi seperti Michael Jakarimilena alumni Indonesia Idol 2004, Lala Suwages, Frans Sisir Asia's Got Talent 2019, Boii Soasoa, dan Grup Leisplang Seniman serta penari tradisional asal Maumere, NTT.

Mereka telah membawakan lagu-lagu bernuansa Melanesia yang dipadukan dengan unsur musik Indonesia, sehingga menciptakan karakter musikal yang khas. Beberapa lagu yang ditampilkan antara lain seperti Kawarine, Wayawai Windawe, Building a Bridge of Love" lagu baru ciptaan Stephen Wally, Diru Diru Nina O, kegiatan lanjut Indonesian Nights kelompok tari asal Papua, Kasbi Dance, turut memeriahkan acara melalui pertunjukan tari yang energik. Grup musik Leisplang dari Maumere, NTT, juga tampil dengan membawakan tari Ikun B'eta, yang kemudian dilanjutkan dengan lagu Sora (Lagu Anak-Anak) dan Gemu Fa Mi Re, tarian dan nyanyian dengan salah satu judul Gong Waning tentang gotong royong dan isu lingkungan. Dalam penampilannya,

mereka memanfaatkan berbagai alat musik tradisional seperti gong, waning, sa'ur, jimbe yang dipadukan dengan terren bass, juk (ukulele), benyol (banjo), serta biola untuk menghasilkan harmoni musik yang unik. Partisipasi Indonesia dalam ajang MACFEST diharapkan dapat menyampaikan pesan persatuan serta memperkuat komitmen kerja sama, sekaligus mempererat hubungan sosial antara masyarakat Melanesia di Indonesia dengan masyarakat negara-negara Pasifik, khususnya di kawasan sub-Melanesia.

Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Pasifik melalui visi *Pacific Elevation*. Dari beberapa portal berita seperti Paparatv menjelaskan bahwa "Indonesia sudah diundang secara resmi sementara *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) tidak memperoleh undangan resmi maupun ruang partisipasi dalam acara tersebut. artinya keterlibatan dalam kegiatan tersebut hanya diperuntukkan bagi anggota resmi asosiasi MSG, sehingga kelompok ULMWP tidak termasuk di dalamnya, Indonesia memperoleh tempat resmi di Venue Saralana dalam acara tersebut, sementara kelompok ULMWP justru tidak mendapatkan tempat yang disediakan oleh panitia." Hal ini menegaskan bahwa panitia hanya memfasilitasi peserta yang memiliki kedudukan resmi dalam kegiatan tersebut, dengan situasi yang cukup menegangkan Indonesia tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai negara yang mempunyai nilai-nilai persatuan.

Strategi utama Indonesia yang diterapkan adalah melakukan rebranding identitas nasional dengan menonjolkan fakta sosiologis bahwa Indonesia adalah rumah bagi 11 juta hingga 13 penduduk etnis Melanesia. Melalui seniman-seniman dari Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia berupaya melakukan kontra-narasi terhadap isu marjinalisasi budaya yang sering dihembuskan oleh kelompok pro-kemerdekaan Papua di forum internasional (Kemlu RI, 2023). Partisipasi ini secara strategis bertujuan untuk membuktikan bahwa identitas Melanesia di Indonesia tidak hanya diakui, tetapi juga dilestarikan dan menjadi bagian integral dari kerangka kebangsaan yang inklusif, sehingga mampu mengikis dukungan publik di Vanuatu terhadap isu separatisme (ANTARA News, 2023). Dalam implementasinya, Indonesia menjalankan diplomasi jalur kedua (second-track diplomacy) melalui kolaborasi seni musik dan tari. Penampilan grup musik "Papua Dalam Cinta" yang membawakan lagu-lagu bertema persaudaraan dan perdamaian, serta kelompok "Leisplang" dari Maumere yang menampilkan musik bambu, menjadi instrumen soft power yang efektif untuk membangun koneksi emosional dengan masyarakat lokal Vanuatu (Kemendikbudristek, 2023).



Gambar 1. MACFest in Post Villa, Vanuatu (2023)

Berdasarkan analisis dari Vanuatu Daily Post (2023), kehadiran seniman-seniman ini menciptakan titik temu budaya yang orisinal, di mana audiens lokal dapat melihat kemiripan alat musik dan ritme tari yang identik dengan tradisi mereka sendiri. Strategi ini sangat krusial atau bisa disebut perang narasi, karena selama ini publik Pasifik lebih banyak terpapar informasi satu sisi mengenai isu politik dan HAM di Papua. Dengan menghadirkan wajah manusiawi dan kultural melalui seniman Papua, Indonesia berhasil mendistorsi dominasi isu politik dan menggantinya dengan apresiasi terhadap kekayaan budaya bersama. Indonesia memanfaatkan statusnya sebagai Associate Member dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG) untuk memantapkan legitimasi politik melalui arena kebudayaan. Hal ini melibatkan koordinasi tingkat tinggi antara Kementerian Luar Negeri dan Kemendikbudristek untuk memastikan bahwa partisipasi Indonesia tidak hanya dipandang sebagai atraksi seni belaka, tetapi juga sebagai komitmen politik terhadap persatuan kawasan Melanesia (Ditjen Kebudayaan, 2023).

Berdasarkan analisis oleh Pugu (2024)

“beragam atraksi budaya ditampilkan dalam kegiatan tersebut berhasil menarik perhatian masyarakat lokal, salah satu penampilan yang paling memukau berasal dari grup musik Desa Leisplang, Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang membawakan tarian Ikun B’eta. Penampilan tersebut mendapat respons antusias dari para penonton karena dinilai mampu menghadirkan kekayaan budaya dan ciri khas tradisi Indonesia secara menarik dan atraktif dan dengan seluruh rangkaian pertunjukan, delegasi Indonesia mendapat sambutan yang cukup baik dari panitia penyelenggara serta masyarakat adat Vanuatu, bahkan, delegasi Indonesia diterima dengan penuh kekeluargaan oleh kepala suku terbesar di Vanuatu, yaitu suku Ambrym.”

Keberhasilan strategi ini terlihat juga dari respon positif Sekretariat MSG dan masyarakat lokal yang memberikan panggung kehormatan bagi delegasi Indonesia. Melalui partisipasi aktif dalam MACFest, Indonesia secara efektif mengalihkan perhatian dari internasionalisasi isu Papua ke arah kerja sama pembangunan dan pelestarian budaya yang lebih konstruktif (KBR, 2023).

Meskipun tantangan diplomatik tetap ada, Strategi tersebut terbukti efektif dalam mereduksi isu politik tingkat tinggi menjadi pendekatan yang lebih rendah, dalam hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara Pasifik. serta memperkuat posisi tawar Indonesia di kawasan Pasifik Selatan. *People-to-People Contact* menunjukkan bahwa diplomasi tidak hanya berlangsung secara top-down antar pemerintah, tetapi juga berkembang secara bottom-up melalui interaksi langsung antar masyarakat lokal. Pertukaran antara seniman Indonesia dengan masyarakat lokal Vanuatu serta delegasi dari negara lain seperti Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, dan Kaledonia Baru mampu membangun hubungan emosional yang tulus di tingkat akar rumput. Selain itu, interaksi informal yang terjadi dalam kegiatan seperti lokakarya seni dan pameran turut berperan dalam membangun kepercayaan (*trust building*) dengan mengurangi prasangka politik.

Analisis Diplomasi Budaya Indonesia Melalui MACFest 2023 dalam Perspektif Soft Power

Strategi diplomasi budaya Indonesia melalui MACFEST 2023 dapat dianalisis menggunakan konsep soft power yang dikemukakan oleh Joseph S. Nye. Soft power merupakan kemampuan suatu negara untuk memengaruhi aktor lain bukan melalui tekanan militer atau ekonomi, melainkan melalui daya tarik budaya, nilai, dan legitimasi kebijakan. Dalam konteks hubungan Indonesia dan Vanuatu, pendekatan soft power menjadi sangat penting karena konflik diplomatik yang terjadi terkait isu Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hard power atau tekanan politik semata. Indonesia menyadari bahwa internasionalisasi isu Papua di kawasan Pasifik lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi, identitas budaya Melanesia, solidaritas regional, dan opini publik masyarakat Pasifik. Melalui partisipasi dalam MACFEST 2023, Indonesia berusaha membangun citra sebagai negara Melanesia yang inklusif serta mitra kawasan Pasifik yang menghormati budaya lokal.

Diplomasi budaya yang dilakukan Indonesia tidak hanya bertujuan memperlihatkan kekayaan seni dan budaya Papua serta Nusa Tenggara Timur, tetapi juga menjadi instrumen politik luar negeri untuk membangun legitimasi regional. Dengan mengirim delegasi seniman Papua dan NTT, Indonesia mencoba menunjukkan bahwa identitas Melanesia tidak terpisah dari identitas nasional Indonesia. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi counter-narrative terhadap kampanye kelompok pro-kemerdekaan Papua yang selama ini membangun narasi bahwa masyarakat Papua terpinggirkan secara budaya maupun politik.

Dalam perspektif soft power, keberhasilan diplomasi budaya tidak hanya diukur dari hubungan antar pemerintah, tetapi juga dari kemampuan membentuk persepsi positif masyarakat internasional. MACFEST 2023 menjadi ruang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat *people-to-people contact* dengan masyarakat Melanesia di Pasifik Selatan. Interaksi langsung antara seniman Indonesia dengan masyarakat lokal Vanuatu menciptakan hubungan emosional yang lebih efektif dibandingkan diplomasi formal di forum internasional. Oleh karena itu, partisipasi Indonesia dalam MACFEST dapat dipahami sebagai bentuk penggunaan soft power berbasis budaya untuk memperkuat posisi diplomatik Indonesia di kawasan Pasifik Selatan.

1) *Cultural Attraction*

Dalam teori soft power Joseph Nye, budaya menjadi salah satu sumber utama daya tarik suatu negara. *Cultural attraction* atau daya tarik budaya muncul ketika budaya suatu negara mampu diterima, dikagumi, dan menciptakan kedekatan emosional dengan masyarakat negara lain, artinya di MACFEST 2023, Indonesia menggunakan budaya Papua dan Nusa Tenggara Timur sebagai instrumen diplomasi untuk membangun kedekatan dengan masyarakat Melanesia di

kawasan Pasifik Selatan. Partisipasi Indonesia melalui penampilan kelompok “Papua Dalam Cinta”, Kasbi Dance, dan Leisplang menunjukkan bahwa Indonesia berusaha menghadirkan representasi budaya yang autentik dan dekat dengan identitas Melanesia. Penggunaan alat musik tradisional seperti gong, jimbe, waning, serta tarian dan lagu bernuansa Melanesia menciptakan kesamaan identitas budaya antara delegasi Indonesia dengan masyarakat Vanuatu. Kesamaan tersebut menjadi penting karena selama ini identitas Melanesia sering digunakan kelompok pro-kemerdekaan Papua sebagai dasar membangun solidaritas politik di kawasan Pasifik.

Daya tarik budaya Indonesia dalam MACFEST juga terlihat dari respon positif masyarakat lokal Vanuatu terhadap delegasi Indonesia. Kehadiran seniman Papua dan NTT memperlihatkan bahwa budaya Melanesia di Indonesia masih hidup dan berkembang dalam kerangka nasional Indonesia. Hal ini menjadi bentuk diplomasi simbolik yang kuat karena Indonesia tidak hanya menyampaikan pesan politik secara langsung, tetapi membiarkan budaya berbicara melalui pertunjukan seni, musik, dan interaksi sosial. Strategi tersebut lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan pendekatan diplomasi formal yang cenderung politis. Selain itu, Cultural attraction yang dibangun Indonesia juga berfungsi untuk mengurangi stereotip negatif mengenai Papua yang selama ini berkembang di kawasan Pasifik. Dengan demikian, budaya dijadikan instrumen untuk membangun citra positif Indonesia sekaligus menciptakan hubungan emosional dengan masyarakat Melanesia di Pasifik Selatan.

2) *National Values Transmission*

Selain budaya, soft power juga berkaitan dengan kemampuan suatu negara mentransmisikan nilai-nilai nasional kepada masyarakat internasional. Dalam partisipasinya di MACFEST 2023, Indonesia tidak hanya menampilkan seni budaya, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai nasional seperti persatuan dalam keberagaman, toleransi, gotong royong, dan inklusivitas budaya. Nilai tersebut tercermin dalam berbagai penampilan delegasi Indonesia yang menggabungkan unsur budaya Papua, Nusa Tenggara Timur, dan identitas nasional Indonesia. Melalui konsep “Bhinneka Tunggal Ika”, Indonesia berusaha menunjukkan bahwa keberagaman budaya dan etnis bukanlah ancaman terhadap persatuan nasional, melainkan bagian penting dari identitas Indonesia. Strategi ini sangat relevan dalam menghadapi narasi kelompok pro-kemerdekaan Papua yang sering menggambarkan Papua sebagai wilayah yang terpisah secara identitas dari Indonesia. Dengan menghadirkan seniman asli Papua dalam delegasi resmi negara, Indonesia mencoba memperlihatkan bahwa masyarakat Papua memiliki ruang dalam representasi nasional Indonesia di tingkat internasional.

Nilai gotong royong dan solidaritas sosial juga ditampilkan melalui lagu-lagu bertema persaudaraan dan perdamaian yang dibawakan delegasi Indonesia. Pesan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia ingin membangun hubungan kawasan Pasifik berdasarkan kerja sama dan persatuan, bukan konflik politik. Dalam perspektif soft power, penyampaian nilai seperti ini penting karena dapat membentuk persepsi bahwa Indonesia merupakan negara yang menghormati keberagaman budaya dan mendukung kerja sama regional secara damai. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam MACFEST juga menunjukkan komitmen terhadap pelestarian budaya lokal dan penghormatan terhadap identitas Melanesia. Indonesia berupaya menegaskan bahwa masyarakat Melanesia di Papua, Maluku, dan NTT merupakan bagian sah dari identitas nasional Indonesia. Dengan demikian, diplomasi budaya Indonesia tidak hanya bersifat hiburan atau pertunjukan seni, tetapi juga menjadi media transmisi nilai nasional kepada masyarakat internasional, khususnya negara-negara Pasifik Selatan.

3) *Nation Branding*

Partisipasi Indonesia dalam MACFEST 2023 juga dapat dianalisis sebagai bentuk nation branding atau upaya membangun citra negara di tingkat internasional. Nation branding merupakan strategi suatu negara untuk membentuk persepsi positif melalui identitas budaya, kebijakan luar negeri, maupun interaksi internasional (Rahayu & Arianti, 2014). Dalam kasus ini, Indonesia berusaha membangun citra sebagai negara multikultural yang memiliki identitas ras yang sama Melanesia, Polinesia, maupun Mikronesia, sekaligus berperan aktif dalam kerja sama kawasan Pasifik. Selama ini citra Indonesia di kawasan Pasifik sering dipengaruhi oleh isu Papua, terutama tuduhan pelanggaran HAM dan dukungan terhadap gerakan separatis yang diangkat Vanuatu di forum internasional. Kondisi tersebut membuat Indonesia perlu membangun citra alternatif yang lebih positif melalui pendekatan budaya. MACFEST menjadi sarana strategis karena festival ini dihadiri masyarakat, seniman, dan perwakilan negara-negara Melanesia sehingga memiliki pengaruh besar terhadap opini publik kawasan.

Melalui partisipasi dalam festival budaya, Indonesia mencoba memperlihatkan bahwa dirinya bukan negara asing bagi masyarakat Melanesia, melainkan bagian dari komunitas budaya yang sama. Pengiriman delegasi Papua dan Nusa Tenggara (NTT) memperkuat branding Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya Melanesia terbesar di kawasan. Selain itu, Indonesia juga ingin membangun citra sebagai negara yang menghormati budaya lokal, mendukung pelestarian tradisi, dan aktif dalam kerja sama budaya regional. Nation branding ini juga berkaitan dengan kebijakan Pacific Elevation yang dijalankan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan budaya, pendidikan, dan bantuan pembangunan, Indonesia berupaya memperkuat pengaruhnya di Pasifik Selatan. Nation branding yang dibangun Indonesia tidak hanya berfokus pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakat kawasan Pasifik melalui interaksi budaya secara langsung. Dengan demikian, MACFEST menjadi bagian dari strategi diplomasi publik Indonesia untuk membangun citra positif dan meningkatkan legitimasi regional di tengah persaingan narasi mengenai Papua.

4) *Non-Coercive Influence*

Pendekatan non-coercive influence menjadi penting karena Indonesia tidak dapat sepenuhnya menghilangkan dukungan Vanuatu terhadap isu Papua melalui tekanan politik atau ekonomi. Oleh sebab itu, Indonesia memilih menggunakan pendekatan budaya dan hubungan antarmasyarakat untuk memengaruhi persepsi masyarakat Pasifik secara lebih halus dan persuasif (Santoso *et al.*, 2025). Melalui partisipasi Indonesia dalam MACFEST 2023 menunjukkan bahwa diplomasi budaya dapat menjadi alat pengaruh non-koersif yang efektif. Indonesia tidak secara langsung melakukan kampanye politik mengenai Papua selama festival berlangsung, tetapi menggunakan seni, musik, dan budaya sebagai media untuk membangun kedekatan emosional dengan masyarakat Melanesia. Pendekatan ini lebih mudah diterima karena tidak menimbulkan kesan intervensi atau propaganda politik. Pengaruh non-koersif Indonesia juga terlihat melalui interaksi people-to-people contact antara delegasi Indonesia dengan masyarakat lokal Vanuatu. Hubungan informal yang terbentuk melalui pertunjukan budaya, lokakarya seni, dan kegiatan sosial mampu menciptakan trust building yang sulit dicapai melalui diplomasi formal. Dalam jangka panjang, hubungan emosional semacam ini dapat memengaruhi opini publik masyarakat Pasifik terhadap Indonesia secara lebih positif.

Selain itu, pendekatan non-koersif melalui budaya memungkinkan Indonesia memperluas pengaruh regional tanpa menciptakan konflik terbuka dengan Vanuatu maupun kelompok pro-kemerdekaan Papua. Strategi ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih memilih membangun legitimasi melalui kerja sama budaya dan kedekatan identitas dibandingkan menggunakan tekanan politik secara langsung. Dengan demikian, diplomasi budaya melalui MACFEST 2023 menjadi

contoh bagaimana soft power dapat digunakan Indonesia untuk mempertahankan pengaruh diplomatik di kawasan Pasifik Selatan secara lebih damai, persuasif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Diplomasi budaya melalui Melanesian Arts and Culture Festival (MACFest) 2023 menjadi salah satu strategi yang digunakan Indonesia untuk merespons internasionalisasi isu Papua di Vanuatu dan kawasan Pasifik. Melalui partisipasi dalam festival tersebut, Indonesia memanfaatkan budaya sebagai instrumen soft power dengan menampilkan berbagai kesenian, musik, tarian, serta identitas budaya Melanesia yang berasal dari Papua dan Nusa Tenggara Timur. Kehadiran delegasi budaya Indonesia tidak hanya bertujuan memperkenalkan kekayaan budaya nasional, tetapi juga memperkuat pemahaman bahwa masyarakat Melanesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberagaman Indonesia. Strategi diplomasi budaya yang dijalankan melalui MACFest 2023 mencerminkan penerapan unsur-unsur soft power, yaitu cultural attraction, national values transmission, nation branding, dan non-coercive influence. Daya tarik budaya dibangun melalui pertunjukan seni dan budaya yang memiliki kedekatan dengan masyarakat Melanesia di kawasan Pasifik. Pada saat yang sama, Indonesia menyampaikan nilai-nilai persatuan, keberagaman, toleransi, dan gotong royong sebagai bagian dari identitas nasional. Festival tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana membangun citra Indonesia sebagai negara multikultural yang memiliki ikatan historis dan kultural dengan komunitas Melanesia.

Partisipasi Indonesia dalam MACFest 2023 turut memperkuat hubungan sosial dan budaya dengan masyarakat serta negara-negara Melanesia. Interaksi langsung antara delegasi Indonesia dan masyarakat lokal menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka, meningkatkan pemahaman bersama, serta membangun hubungan yang lebih positif di tingkat masyarakat. Pendekatan budaya tersebut memberikan alternatif terhadap diplomasi yang bersifat formal dan memungkinkan Indonesia menyampaikan narasinya secara lebih persuasif dan mudah diterima.

Meskipun demikian, diplomasi budaya melalui MACFest 2023 belum mampu menghilangkan dukungan Vanuatu terhadap internasionalisasi isu Papua. Sikap Vanuatu masih dipengaruhi oleh faktor historis, politik, dan solidaritas Melanesia yang telah berkembang sejak lama. Namun, diplomasi budaya mampu menjadi sarana untuk mengurangi dominasi narasi negatif mengenai Papua, memperluas ruang komunikasi, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai bagian dari komunitas Melanesia di kawasan Pasifik. Diplomasi budaya melalui MACFest 2023 menunjukkan bahwa pendekatan soft power dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung kepentingan Indonesia di kawasan Pasifik. Melalui budaya, Indonesia mampu membangun citra positif, mempererat hubungan dengan masyarakat Melanesia, memperkuat nation branding, serta mendukung upaya menangkal internasionalisasi isu Papua melalui cara yang damai, persuasif, dan berkelanjutan.

SARAN

Pemerintah Indonesia terus memperkuat diplomasi budaya di kawasan Pasifik secara konsisten dan berkelanjutan, tidak hanya melalui partisipasi dalam MACFest tetapi juga melalui berbagai program pertukaran budaya, pendidikan, dan kerja sama antarmasyarakat. Diplomasi budaya yang dilakukan sebaiknya tidak hanya berfokus pada promosi keberagaman budaya Indonesia, tetapi juga mampu menghadirkan narasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial, budaya, dan pembangunan di Papua sehingga dapat membangun pemahaman yang lebih objektif di kalangan masyarakat dan negara-negara Pasifik. keberhasilan diplomasi budaya tidak dapat hanya diukur dari meningkatnya citra positif Indonesia, tetapi juga perlu didukung oleh kebijakan yang mampu menjawab berbagai isu yang menjadi perhatian internasional terkait

Papua. Dengan demikian, diplomasi budaya dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pembentukan citra (nation branding), tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kredibilitas Indonesia dalam merespons berbagai tantangan diplomatik di kawasan Pasifik. Oleh karena itu, sinergi antara diplomasi budaya dan kebijakan pembangunan yang inklusif menjadi penting agar pesan yang disampaikan melalui berbagai forum internasional memiliki legitimasi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama proses penyusunan penelitian ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Hubungan Internasional serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan data, referensi, dan informasi yang mendukung pelaksanaan penelitian ini. Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan selama proses penelitian hingga penulisan artikel ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anholt, S. (2007). *Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions*. Palgrave Macmillan.
- Ang, I., Isar, Y. R., & Mar, P. (Eds.). (2016). *Cultural Diplomacy: Beyond the National Interest?* Routledge.
- Cull, N. J. (2009). *Public Diplomacy: Lessons from the Past*. Figueroa Press.
- Cummings, M. C. (2003). *Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey*. Center for Arts and Culture.
- Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. PublicAffairs.
- Wendt, A. (1992). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press.
- Hamidi. (2007). *Metode penelitian kualitatif: Pendekatan praktis*. UMM Press.
- Creswell, J. W. (2016). Hal. 9 *Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (Edisi ke-4). Pustaka Pelajar.
- Ihalauw, J. J. O. I. (2003). *Bangunan teori* (hal. 174–178). Kristiani University (UKSW).
- Dewanti, A. A. (2025). Kebijakan luar negeri Vanuatu dalam internasionalisasi isu HAM di Papua dalam Dewan Majelis PBB pada tahun 2016-2021. *Global Insights Journal*, 2(1). <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/12194>
- Herindrasti, S., Fernando, J., & Hop, T. M. (2025). Pacific Elevation: Indonesia's vision for strategic engagement and regional diplomacy. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 9(1), 98–131. <https://doi.org/10.33541/japs.v9i1.7146>. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/34306>
- Mbira, C. (2023). The role of cultural diplomacy in strengthening soft power among emerging economies. *American Journal of International Relations*, 8(3), 45–58. <https://ajpojournals.org/journals/AJIR/article/view/2464>
- Kevin. (2020). Analisis strategi pemerintah Indonesia terhadap intervensi Vanuatu dalam konflik Papua Barat melalui Melanesian Spearhead Group (MSG) Skripsi, Universitas Pasundan. Repository Universitas Pasundan. <https://id.scribd.com/document/906486382/SKRIPSI-KEVIN->

[Analisis-Strategi-Pemerintah-Indonesia-Terhadap-Intervensi-Vanuatu-Dalam-Konflik-Papua-Barat-Melalui-Melanesian-Spearhead-Group-MSG](#)

- Nuaba, I. K. A. (2025). Indonesia's soft power diplomacy agenda in supporting national interests. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(1), 1–22. <https://ejournal.upnvj.ac.id/JM/article/view/10799>
- Elmslie, J., & Webb-Gannon, C. (2013). A slow-motion genocide: Indonesian rule in West Papua. *Griffith Journal of Law & Human Dignity*, 1(2), 142–166. <https://ro.uow.edu.au/sspapers/4021>
- Wardhani, B. L. S. W. (2023). From Jakarta to Oceania: Indonesia's cultural diplomacy with the South Pacific. Universitas Airlangga. Retrieved from <https://repository.unair.ac.id/133376/1/From%20Jakarta%20to%20Oceania%20Indonesia%E2%80%99s%20Cultural%20Diplomacy%20with%20the%20South%20Pacific.pdf>
- Farizal, F. (2023). Diplomasi Kebudayaan Indonesia Dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) Melalui Penyelenggaraan Melanesian Arts And Cultural Festival Periode 2015–2018 (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Repository. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75452>
- Soesilowati, S. (2015). Diplomasi soft power Indonesia melalui atase pendidikan dan kebudayaan. *Jurnal Global Strategis*, 9(2), 293–308. <https://ejournal.unair.ac.id/JGS/article/view/6915>
- Ulyana, Y. A. (2022). The role of cultural diplomacy: Indonesia–Malaysia relations. *Asian People Journal (APJ)*, 5(2). <https://journal.unisza.edu.my/apj/index.php/apj/article/view/43>
- Wulandari, T. (2022). Diplomasi budaya Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan negara Melanesia. *Jurnal Hubungan Internasional dan Diplomasi*, 4(1), 14–28.
- Yani, Y. M., & Lusiana, E. (2023). Soft power dan soft diplomacy. *Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 14(2). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/3165>
- Zaelani, R. A. F., & Sahide, A. (2022). Promoting a better image through culture: The case of Turkey's cultural diplomacy towards Indonesia. *Journal of Islamic World and Politics*, 5(2). <https://journal.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/10890>
- Zulkarnain, M., & Ratri, N. (2023). Soft power and the projection of Indonesia's foreign policy in the Pacific. *Jurnal Kajian Wilayah Global*, 6(1), 77–90.
- Anwar, D. F. (2010). Indonesia's foreign policy: A quest for identity. *Southeast Asian Affairs*, 2010(1), 121–141. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). Partisipasi Indonesia dalam Melanesian Arts and Culture Festival (MACFest) di Vanuatu. Siaran Pers Resmi, Direktorat Asia Pasifik dan Afrika.
- UNESCO. (2022). *Culture for Sustainable Development: Cultural Diplomacy and Soft Power in the Asia-Pacific Region*. Paris: UNESCO Publishing.
- Sekretariat Melanesian Spearhead Group. (2023). *Official Report on the 7th Melanesian Arts and Culture Festival (MACFest) in Vanuatu*. Port Vila: MSG Secretariat.
- Dinnie, K. (2015). *Nation Branding: Concepts, Issues, Practice* (2nd ed.). Routledge.
- Aronczyk, M. (2013). *Branding the Nation: The Global Business of National Identity*. Oxford University Press.

- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Indonesia 2021. Badan Pusat Statistik. <https://bps.go.id/publication/2021/02/26/32c74c6ae662d9b6b95be4a6/statistik-indonesia-2021.htm>
- Bali Puspa News. (2023). *Hadirnya artis dan seniman Papua dan NTT di MACFest 2023 Vanuatu tingkatkan citra positif Indonesia*. <https://www.balipuspanews.com/hadirnya-artis-dan-seniman-papua-dan-ntt-di-macfest-2023-vanuatu-tingkatkan-citra-positif-indonesia.html>
- Databoks. (2020). *Indonesia–Vanuatu trade deficit widens in 2020*. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/en/trade/statistics/bfd17b8e09b6139/indonesia-vanuatu-trade-deficit-widens-in-2020>
- Tempo. (2023). *Kemendikbudristek sebut Indonesia akan hadir festival budaya Melanesia di Vanuatu*. <https://www.tempo.co/politik/kemendikbudristek-sebut-indonesia-akan-hadiri-festival-budaya-melanesia-di-vanuatu-163273>
- Dokumen/Jurnal:
- Pugu, M. R. (2024). *Indonesian cultural diplomacy towards Vanuatu: Review of the 7th Melanesian Arts and Festival (MacFest) 2023 in Port Vila Vanuatu. Evolutionary Studies in Imaginative Culture*, 8(1), 351–360.
- Universitas Islam Indonesia. (2021). *Diplomasi budaya Indonesia dalam hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan* (Skripsi). Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/34037/14323091%20Alfiah%20Noor%20Rochmiati.pdf>
- Universitas Bina Nusantara. (2020). *Konflik Papua: Pemerintah perlu mengubah pendekatan keamanan dengan pendekatan humanis*. <https://ir.binus.ac.id/2020/10/05/konflik-papua-pemerintah-perlu-mengubah-pendekatan-keamanan-dengan-pendekatan-humanis/>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja tahunan KBRI Canberra 2024*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. https://kemlu.go.id/files/repositori/72974/173880774167a419bdd2c77_LAPORAN_KI_NERJA_TAHUNAN_KBRI_CANBERRA_2024.pdf
- Farizal, F. (2023). *Diplomasi kebudayaan Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) melalui penyelenggaraan Melanesian Arts and Cultural Festival periode 2015–2018* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75452>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024). *Tingkatkan kerja sama bilateral Indonesia–Vanuatu*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://www.setneg.go.id/baca/index/tingkatkan-kerja-sama-bilateral-indonesia-vanuatu>
- Universitas Sam Ratulangi. (2023). Tinjauan hukum internasional terhadap dukungan Vanuatu atas gerakan Papua Merdeka. *Lex Privatum*.
- Buku:
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2022/08/BUKU-PUTIH.pdf>
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra. (2024). *Laporan kinerja tahunan KBRI Canberra 2024*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

https://kemlu.go.id/files/repositori/72974/173880774167a419bdd2c77_LAPORAN_KI_NERJA_TAHUNAN_KBRI_CANBERRA_2024.pdf